

LKJ-IP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T. atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, karena pada awal tahun 2021 ini DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah merupakan media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2021. LKj-IP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja dan Pelaporan Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Melalui Laporan Kinerja ini dapat di komunikasikan dan di informasikan capaian kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI selama tahun 2021. Hal ini diketahui dengan membandingkan capaian kinerja (*performance results*) dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Terkait dengan siklus akuntabilitas, dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 berarti DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI telah melaksanakan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga adanya penyesuaian terhadap lampiran Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI untuk tahun 2016 - 2021 serta dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

KOTA DUMAI 2016-2021 yang telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI di dalam upaya mencapai visi:

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI
PADA TAHUN 2021"**

Kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataanserta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DINAS PEKERJAANN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Kepala Bidang/Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai atas penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021, untuk pengembangan dan penyempurnaan dapat memberikan saran-saran perbaikan.

Dumai, Januari 2022

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Dumai**



**REZA FAHLEPI, ST
Penata Tk.I
NIP. 19830809 200904 1 001**

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran.....	vi
1. Pendahuluan.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. ISU STRATEGIS.....	2
1.4. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
1.5. KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN	8
1.6. DASAR HUKUM	9
2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	13
2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	13
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	15
2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	18
2.4. PERJANJIAN KINERJA	30
3. Akuntabilitas Kinerja	38
3.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	38
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini.....	39
3.1.2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja atau permasalahan dan alternative solusi yang telah dilakukan	42
3.2. REALISASI ANGGARAN	52
4. Penutup.....	62

Daftar Tabel

Tabel 1-1 PNS Dinas PUPR Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2021 ...	8
Tabel 1-2 PNS Dinas PUPR Kota Dumai menurut Jabatan Tahun 2021	8
Tabel 1-3 PNS Dinas PUPR Kota Dumai Menurut Tingkat Pendidikan Formal .	9
Tabel 2-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
Tabel 2-2 Rincian Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kota Dmai.....	18
Tabel 2-3 Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas PUPR.....	31
Tabel 3-2 Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021	38
Tabel 3-3 Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021	53

Daftar Gambar

Gambar 1-1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai	7
--	---

Daftar Lampiran

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 2. Rencana Kinerja Tahunan 2021
3. Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja 2021
4. Pengukuran Kinerja Tahunan / Evaluasi IKU
 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

DABI

1. Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan program-program PUPR.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didasari dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kualitas pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Konsekwensi logis dari pelaksanaan undang-undang tersebut Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan merumuskan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik yang prima sesuai kewenangan dan karakteristik daerah yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan akan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai yang merupakan Instrumen pertanggung jawaban. Keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan, sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Kenerja Tahunan (RKT)dan sejalan dengan Renstra, guna memberikan masukan dan umpan

balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam Rangka meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2021 adalah agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai tahun 2021 adalah :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a) Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai yang dijiwai semangat pelayanan prima.
- b) Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, implementasi, evaluasi program dan kegiatan.
- c) Diperlukan peningkatan tertib administrasi, sesuai dengan perkembangan teknologi.
- d) Reformasi birokrasi yang strategis, konkrit dan terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Peningkatan pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f) Koordinasi internal yang optimal antar fungsi manajemen, antar bidang serta memenuhi prinsip-prinsip good governance.
- 2. Bidang Bina Marga (BM)**
- a) Pembebanan berlebih (Overloading) masih terjadi terutama di jalan Nasional dan Propinsi.
 - b) Meningkatkan kenyamanan prasarana jalan dan jembatan, dengan keterbatasan alokasi dana.
 - c) Meningkatkan aksesibilitas jalan dan jembatan bagi daerah pinggiran sehingga tercipta pembangunan yang merata.
 - d) Sebagian ruas-ruas jalan dan jembatan baru belum dilakukan peningkatan dan fungsional disebabkan kekurangan alokasi dana.
- 3. Bidang Cipta Karya (CK)**
- a) Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dilingkungan kecil.
 - b) Peningkatan pelayanan masyarakat pada pelayanan air bersih serta peningkatan peran serta masyarakat dalam skala perumahan.
 - c) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan pembangunan gedung dan sarana prasarana gedung tempat pelayanan masyarakat.
 - d) Peningkatan koordinasi antara SKPD tentang pembangunan gedung kantor dan rumah dinas.
- 4. Bidang Sumber Daya Air (SDA)**
- a) Kinerja pelayanan jaringan reklamasi lahan basah belum optimal dimana dari lahan basah yang merupakan lahan gambut.
 - b) Meningkatkan pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir yang diakibatkan oleh banjir rob dan genangan air sementara.
 - c) Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah terhadap sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah, yang diakibatkan oleh abrasi

- d) Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur Sumber Daya Air yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.
- e) Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air, akibat berkurangnya ruang terbuka hijau dan menurunnya daya dukung resapan air.
- f) Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan Sumber Daya Air untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
- g) Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur Sumber Daya Air.

5. Bidang Pengujian dan Peralatan

- a) Belum terlayani permintaan masyarakat, dalam kebutuhan alat-alat berat untuk kegiatan pembangunan masyarakat di 7 (tujuh) kecamatan. Hal ini diakibatkan kekurangan armada alat berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.
- b) Diperlukan peningkatan pelayanan laboratorium / pengujian beton, tanah dan aspal. Hal ini merupakan permintaan masyarakat cukup tinggi, akibatnya pelayanan belum maksimal dikarenakan peralatan laboratorium terbatas.

6. Bidang Tata Ruang

- a) Kawasan Pusat kota yang belum tetata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketata ruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *bettterspace better living*.
- b) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak.
- c) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama.

- d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.

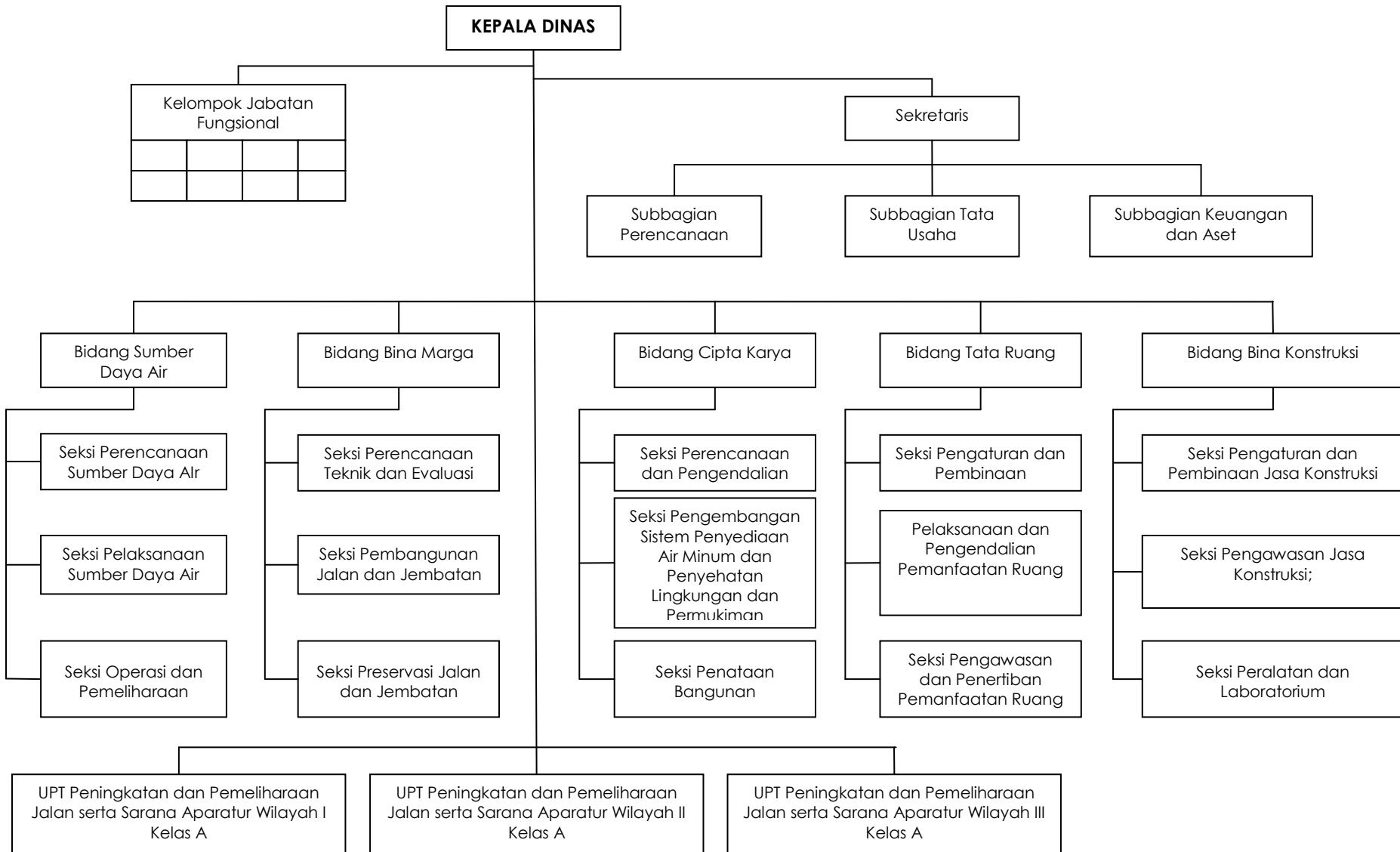
1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, kemudian adanya perubahan Susunan Organisasi pada Unit Pelayanan Teknis Dinas PUPR Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai :

1. Kepala;
2. Sekretaris, yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Sub Bagian Data dan Informasi Publik.
3. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
 - c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
4. Bidang Bina Marga, yang membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya, yang membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;

- b) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan dan Permukiman;
 - c) Seksi Penataan Bangunan.
6. Bidang Tata Ruang, yang membawahi :
- a) Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - b) Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c) Seksi Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang.
7. Bidang Bina konstruksi dan Peralatan, yang membawahi :
- a) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
 - c) Seksi Peralatan dan Laboratorium.
8. Kelompok Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri dari :
- UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A;
 - UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A;
 - UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A;
- Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, sebagai berikut :

Gambar 1-1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai



1.5. KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, didukung dengan **76 orang Pegawai Negeri Sipil**, dengan perincian sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan data pada tabel 1.1. diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai didominasi oleh golongan III yang berjumlah **56 orang atau 73,68%**, sedangkan golongan ruang gaji terkecil adalah golongan II yang berjumlah **18 orang atau 23,68%**.

Tabel 1-1 PNS Dinas PUPR Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2021

NO	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH (Org)	%
1.	Gol. IV	2	2,63
2.	Gol. III	56	73,68
3.	Gol. II	18	23,68
JUMLAH		76	100

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Eselonering.

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum yang berjumlah **76 orang**, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam **4 (empat) kelompok** sebagaimana data pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1-2 PNS Dinas PUPR Kota Dumai menurut Jabatan Tahun 2021

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH (Org)	%
1.	Eselon II	0	0
2.	Eselon III	6	7,89
3.	Eselon IV	24	31,57
4.	Staf/Non Struktural	46	60,52
JUMLAH		76	100,00

c. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel 1.3 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas pekerjaan Umum, didominasi oleh tingkat **pendidikan Sarjana Strata I (S.1)** yang berjumlah **44 orang** atau **57,89%**.

Tabel 1-3 PNS Dinas PUPR Kota Dumai Menurut Tingkat Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMALAH (Org)	%
1	Strata III (S-3)	0	0
2	Strata II (S-2)	8	10,52
3	Strata I (S-1)	41	53,94
4	Diploma III/Sarjana Muda	3	3,94
5	SLTA Sederajat	24	31,57
JUMLAH		76	100,00

d. Kedeadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum Kota Dumai, memiliki 3 (tiga) gedung. Setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC). Disamping itu di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung memperoleh informasi, sumber data dan literatur.

Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

1.6. DASAR HUKUM

1. Tap MPR RI Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Tap MPR RI Nomor : XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang RI Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Propenas.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. INPRES Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.
15. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai .
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD kota Dumai Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

DAD II

2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kepala Daerah : **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”**. Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan untuk memenuhi misi pertama yaitu, Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

Berdasarkan misi pertama, Pemerintah Kota Dumai memiliki tujuan :

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih;
 - Meningkatnya infrastruktur perkotaan;

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Dumai tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai memiliki tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jaringan air bersih yang terjangkau bagi masyarakat, dengan sasaran :

- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum.

2. Meningkatkan Infrastruktur kota yang hijau, humanis dan merata, dengan sasaran :

- Terwujudnya fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Meningkatnya infrastruktur perkotaan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 - Program Penataan Bangunan Gedung;
 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
 - Program Pengembangan Permukiman;
 - Program Penyelenggaraan Jalan;
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda);
 - Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi).

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif.

Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang disusun agar menunjang Visi dan Misi yang telah dicanang adalah sebagai berikut :

1. Menuntaskan kendala-kendala terkait pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas yang mengikutinya untuk mencapai pelayanan air bersih yang optimal
2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan jaringan air dan sanitasi dengan jaringan kabel listrik dan komunikasi
3. Mengembangkan jaringan perpipaan air bersih untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat
4. Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan kontinuitas pelayanan
5. Meningkatkan kualitas proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.
6. Mewujudkan jaringan jalan dan jembatan yang aman dan nyaman serta merata untuk mendukung arus lalu lintas barang/jasa
7. Mengembangkan sistem drainase, bangunan pengendali banjir, dan pengembangan jaringan irigasi
8. Mengembangkan Fasilitas Peralatan dan pengujian

Kebijakan adalah pedoman atau rambu - rambu pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu. Suatu kebijakan dapat mencakup/mendasari lebih dari satu kegiatan.

Berbagai kebijakan dalam mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting
2. Peningkatan Koordinasi lintas stakeholder dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase

3. Peningkatan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan hydrant umum
5. Peningkatan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
6. Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan
8. Peningkatan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota
9. Peningkatan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
10. Pengembangan normalisasi sungai dan jaringan drainase
11. Peningkatan luas daerah resapan air
12. Penyediaan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an

Rincian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Misi Pertama dapat dilihat pada tabel 2-1.

Tabel 2-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

VISI	: Terwujudnya masyarakat damai yang makmur dan madani pada Tahun 2021		
MISI I	: Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jaringan air bersih yang terjangkau bagi masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan	Menuntaskan kendala-kendala terkait pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas yang mengikutinya untuk mencapai pelayanan air bersih yang optimal	Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting

VISI	: Terwujudnya masyarakat damai yang makmur dan madani pada Tahun 2021		
MISI I	: Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan jaringan air dan sanitasi dengan jaringan kabel listrik dan komunikasi	Peningkatan Koordinasi lintas stakeholder dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase
		Mengembangkan jaringan perpipaan air bersih untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat	Peningkatan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga
			Peningkatan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui Kran umum dan hydrant umum
		Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan kontinuitas pelayanan	Peningkatan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
Meningkatkan Infrastruktur kota yang hijau, humanis dan merata	Terwujudnya fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Meningkatkan kualitas proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.	Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Mewujudkan jaringan jalan dan jembatan yang aman dan nyaman serta merata untuk mendukung arus lalu lintas barang/jasa	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan
			Peningkatan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota
		Mengembangkan sistem drainase, bangunan pengendali banjir, dan pengembangan jaringan irigasi	Peningkatan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		Pengembangan normalisasi sungai dan jaringan drainase	
		Peningkatan luas daerah resapan air	
		Mengembangkan Fasilitas Peralatan dan pengujian	Penyediaan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan rangkaian penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya serta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang bersumber dari alokasi dana dari APBD Kota Dumai, APBD Provinsi Riau dan APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam tahun 2019 dan dirinci menurut kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dumai, Mitra yang terlibat serta koordinator dan penanggungjawab juga kewilayahan dengan bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat.

Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai disesuaikan dengan bidang - bidang dalam organisasi dan tata kerja yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 tahun 2008 serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Dumai Tahun 2016 – 2020.

Adapun penjelasan secara umum program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2-2 tentang matriks program dan kegiatan.

Tabel 2-2 Rincian Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kota Dmai

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB, KEGIATAN	INDIKATOR
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB, KEGIATAN	INDIKATOR
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD SKPD
1.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kebutuhan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor - Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha))
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleor kantor
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB, KEGIATAN	INDIKATOR
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran - Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR terlayani Sumur Bor Dalam
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR terlayani Jaringan Perpipaan
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah SPAL yang di Rehabilitasi/Tingkatkan/Perluas
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB, KEGIATAN	INDIKATOR
	Prasarana IPLT	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan Penataan Bangunan dan lingkungan
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Permukiman'
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur kota
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Jalan

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB, KEGIATAN	INDIKATOR
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Kebutuhan rehabilitasi Jembatan
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Panjang Jalan yang dibangun
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah pembangunan Unit Air Baku
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Turap yang dibangun
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Bangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air yang dipelihara
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Saluran Sungai yang dipelihara
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelilaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang dibangun
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Srainasae yang ditingkatkan
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Srainasae yang direhabilitasi
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi yang Profesional
1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB, KEGIATAN	INDIKATOR
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Sistem Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUJK Nasional
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertub Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi danSinkronisasi PemberianInsentif dan DisinsentifBidang Penataan Ruang

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB, KEGIATAN	INDIKATOR
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi danSinkronisasi Penertibandan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan regional
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana Persampahan

Berdasarkan tabe I2-2, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai memiliki tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jaringan air bersih yang terjangkau bagi masyarakat, dengan sasaran :

- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - o Program Pengelolaan Dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan:
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. Kegiatan :
 - ❖ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
 - ❖ Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
 - ❖ Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan;
 - ❖ Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan.

2. Meningkatkan Infrastruktur kota yang hijau, humanis dan merata, dengan sasaran :

- Terwujudnya fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - o Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan :
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota;
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. Kegiatan :
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub, Kegiatan :
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang;
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang;
 - ❖ Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang;
 - ❖ Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.
- Meningkatnya infrastruktur perkotaan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan kegiatan :
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - ❖ Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - ❖ Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 - ❖ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 - ❖ Penyediaan Sarana Persampahan.
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan :
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub. kegiatan :

- ❖ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan sub. kegiatan :
 - ❖ Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG;
 - ❖ Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota;
 - ❖ Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub. kegiatan :
 - ❖ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota;
 - ❖ Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan;
 - ❖ Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - ❖ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.
- Program Pengembangan Permukiman, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan :

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - ❖ Pembangunan Jalan;
 - ❖ Rehabilitasi Jalan;
 - ❖ Pembangunan Jembatan;
 - ❖ Rehabilitasi Jembatan.
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda), dengan kegiatan :
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;
 - ❖ Pembangunan Unit Air Baku;
 - ❖ Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;
 - ❖ Rehabilitasi Tanggul Sungai;
 - ❖ Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir;
 - ❖ Normalisasi/Restorasi Sungai;
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, dengan kegiatan :
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :

- ❖ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
 - ❖ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
 - ❖ Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda), dengan kegiatan :
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;
 - ❖ Pembangunan Unit Air Baku;
 - ❖ Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;
 - ❖ Rehabilitasi Tanggul Sungai;
 - ❖ Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir;
 - ❖ Normalisasi/Restorasi Sungai;
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
 - Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, dengan kegiatan :
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
 - ❖ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
 - ❖ Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
6. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut:

- Program Pengembangan Jasa Konstruksi), dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
 - ❖ Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi;
 - ❖ Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi;
 - ❖ Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi.
 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota;
 - ❖ Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional.
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dengan Sub. kegiatan :
 - ❖ Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
 - ❖ Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses perjanjian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu Tahun

Anggaran dan dituangkan dalam dokumen Pejanjian Kinerja. Pada dokumen Perjanjian Kinerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja Dinas pekerjaan Umum dan merupakan bentuk komitmen penuh untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misinya, maka Dinas Pekerjaan umum telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Selanjutnya disajikan sasaran beserta indikator kinerjanya yang akan dicapai pada tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2-3 Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas PUPR

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator	Target 2021	
			Kinerja	Anggaran
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	161,245,730.00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	161,245,730.00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD yang dibuat	3 Dokumen	84,795,230.00
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11,743,200.00
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	11,657,100.00
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11,873,400.00
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	11,873,400.00
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3 Dokumen	9,221,100.00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK, RKT, dan RA	3 Dokumen	20,082,300.00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8,290,412,886.00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN dan Tunjangan	14 Bulan	8,270,990,616.00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	19,422,270.00

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator	Target 2021	
			Kinerja	Anggaran
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	111,849,000.00
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	2 Dokumen	22,826,300.00
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	29,664,000.00
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventsrisasi Aset	2 Dokumen	59,358,700.00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0 Orang	-
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,063,115,868.00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Komponen Listrik yang dibutuhkan Selama 1 Tahun	12 Bulan	34,054,946.00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan	263,003,990.00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum tamu, rapat dan kegiatan	12 Bulan	53,860,400.00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	148,874,772.00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	12 Bulan	19,116,000.00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi ke luar daerah selama 1 Tahun	12 Bulan	532,673,760.00
1.3.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 Bulan	11,532,000.00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5,287,366,650.00
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	0 Unit	-
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	1 Unit	-
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Berat/Alat Besar	1 Unit	4,950,000,000.00
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	0 Unit	-
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	21 unit	271,758,450.00
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang dibutuhkan	17 Unit	65,608,200.00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,380,647,040.00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah PemakaianJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	355,824,000.00
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Event Daerah	12 Bulan	58,300,000.00

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator	Target 2021	
			Kinerja	Anggaran
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Tenaga Pelayanan Umum Kantor	45 Orang	966,523,040.00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,707,098,350.00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	351,170,000.00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	386,500,000.00
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Perawatan/Pemeliharaan Alat Berat	16 Unit	1,969,428,350.00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	-
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan Yang Ditangani	370 Ha	20,523,731,242.00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	30%	20,523,731,242.00
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan/DED yang dihasilkan	4 Dokumen	765,055,293.00
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah bangunan prasarana yang dibangun	0 Unit	-
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Panjang Turap yang dibangun	273 m	1,817,437,984.00
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang dipelihara	650 m	1,803,185,763.00
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pompa dan Pintu Air yang dipelihara	40 unit	1,295,586,234.00
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan	120 km	14,842,465,968.00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Saluran Sungai yang dibersihkan Persentase Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	30%	485,280,000.00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kebutuhan Saluran Irigasi Permukaan yang dipelihara 1 Tahun	12 Bulan	485,280,000.00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Terlayani SPAM jaringan Perpipaan	15%	8,317,487,249.00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5615 Jiwa	8,317,487,249.00
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR) yang dibangun	850 Jiwa	2,162,979,655.00

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator	Target 2021	
			Kinerja	Anggaran
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR terlayani jaringan perpipaan	4115 Jiwa	6,104,893,794.00
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM	650 Jiwa	49,613,800.00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100%	6,128,977,521.00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100%	6,128,977,521.00
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	2 KM	3,831,648,955.00
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah panjang saluran drainase yang bangun dan dipelihara	3 Km	2,297,328,566.00
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	3,591,000,147.00
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman	100%	3,591,000,147.00
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana permukiman yang ditingkatkan dan dipelihara	21 unit	3,591,000,147.00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Strategis Kota yang dibangun	23 Unit	36,991,173,824.00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	66.27%	36,991,173,824.00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 Bulan	160,384,900.00
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	17 Unit	35,549,410,416.00
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	1,281,378,508.00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	2%	29,370,961,351.00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalan dalam Kondisi Baik	10 KM	29,370,961,351.00
1.3.10.2.01.4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen Kondisi Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	199,895,225.00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	8.62 KM	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator	Target 2021	
			Kinerja	Anggaran
				10,999,760,320.00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	1.38 KM	7,209,089,435.00
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Kebutuhan Rehabilitas Jalan	12 Bulan	6,659,068,970.00
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	18 Unit	1,933,410,000.00
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Kebutuhan Rehabilitas Jembatan	12 Bulan	2,369,737,401.00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100%	106,291,550.00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	106,291,550.00
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi Yang Profesional	1 Kegiatan	33,780,000.00
1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	12 Bulan	72,511,550.00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang	100%	1,159,589,982.00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100%	448,971,400.00
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	361,229,200.00
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	50 Orang	87,742,200.00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,971,610.00
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	99,971,610.00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	610,646,972.00
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	59,005,500.00
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	88,742,910.00
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	462,898,562.00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapa	0%	-

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator	Target 2021	
			Kinerja	Anggaran
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan Sengketa Tanah yang dimediasikan dalam 1 tahun	0 Mediasi	-
	PROGRAM PENATAAN DESA	Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa	1,2 KM	4,300,000,000.00
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Peningkatan persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	2%	4,300,000,000.00
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	1,2 KM	4,300,000,000.00

DAD III

3. Akuntabilitas Kinerja

3.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3-1 Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021			
			TARGET	REALISASI	KINERJA	KET
A	PEKERJAAN UMUM					
1	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	SR	16230	3551	21.87%	Belum Tercapai
2	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58.35	43.86	75.16%	Belum Tercapai
3	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran tidak tersumbat	%	71.2	77.69	100%	Tercapai
4	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	72	84	100%	Tercapai
5	Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	87.5	87.5	100%	Tercapai
6	Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	87.5	87.5	100%	Tercapai
B	PENATAAN RUANG					

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2021			
			TARGET	REALISASI	KINERJA	KET
1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	ada	ada	100%	Tercapai

Dari Tabel Pengukuran Kinerja SKPD Tahun 2021 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

1. Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 16230 SR dan capaian indikator ini sampai tahun 2021 yaitu 3551 SR atau 21,87%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan.

2. Persentase layanan untuk penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) terhadap permohonan KRK

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 87,5 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2021 yaitu 87,5 % atau 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang.

3. Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 87,5 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2021 yaitu 87,5 % atau 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu sistem Informasi Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Koordinasi

dan Sinkonisasi penerbitan dan Penegak Hukum Bidang Penataan Ruang, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

4. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 58,35 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2021 yaitu 43,86 % atau 75,16 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Survey Kondisi jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota, Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

5. Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 71,2 % capaian indikator ini sampai tahun 2021 yaitu 77,69 % atau 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.

6. Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 72 % capaian indikator ini sampai tahun 2021 yaitu 84 % atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase, Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, Rehabilitasi Tanggul Sungai, Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung pengendalian Banjir, Normalisasi / Restorasi Sungai , Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman, Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga

Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG, Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah kabupaten/ Kota, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota.

3.1.2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja atau permasalahan dan alternative solusi yang telah dilakukan

- Keberhasilan / Peningkatan ini ditopang oleh dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah, adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah pusat, Dana Insentif Daerah (DID), yang meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Dumai.
- Kegagalan / Penurunan ini dikarenakan oleh terbatasnya Anggaran Pemerintah Kota Dumai, kurangnya swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan lingkungan, Indikator Kinerja Kapasitas Debit Air Bersih belum mencapai target dikarenakan Kapasitas produksi tahun 2021 belum bisa meningkat dikarenakan program NUWSP SPAM Dumai yg dilaksanakan oleh PU Provinsi baru dilaksanakan tahun 2021 dan target penyelesaian di tahun 2021 bulan 6, program SPAM Regional DUROLIS juga masih dalam tahap konstruksi jaringan distribusi utama ke arah Kota Dumai, sedangkan Program KPBU tahap 1B akan dilaksanakan di bulan maret tahun 2021 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2021, NUWSP nantinya nambah 50 liter per detik, KPBU tahap 1B nantinya nambah 200 liter per detik, SPAM Regional Durolis nantinya akan diterima 150 liter per detik yang akan diterima Kota Dumai pada tahun 2022.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

A. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan air Minum

Pada tahun 2021, jumlah anggaran Rp. 8.317.487.249,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.201.932.898,00 atau sebesar 98,61% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.162.979.655,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.104.240.143,00 dan atau sebesar 97,28% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR) yang dibangun dengan target 850 Jiwa atau capaian realisasi 100 %.

2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.104.893.794,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.048.078.955,00 atau sebesar 99,07% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah SR terlayani jaringan perpipaan dengan target 4115 Jiwa atau capaian realisasi 99,93 %.
3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 49.613.800,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.613.800,00 dan atau sebesar 100,00% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM target 650 Jiwa atau capaian realisasi 0 %. Indikator Kinerja Ini Belum Mencapai Target Dikarenakan Tidak Tersedianya Anggaran Untuk Pemeliharaan, Anggaran Yang Tersedia Hanya Untuk Pembayaran Gaji Petugas Keamanan.

B. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada tahun 2021, jumlah anggaran Rp. 1.159.589.982,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 973.845.157,00 atau sebesar 83,98% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 361.229.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 284.843.786,00 dan atau sebesar 78,85% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen RTRW Kabupaten/Kota dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 87.742.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 60.521.844,00 dan atau sebesar 68,98% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang dengan target 50 Orang atau capaian realisasi 150 %.

3. Sistem Informasi Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 99.971.610,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.713.400,00 dan atau sebesar 99,74% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 59.005.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.752.023,00 dan atau sebesar 75,84% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif

Bidang Penataan Ruang dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 88.742.910,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 88.492.150,00 dan atau sebesar 99,72% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

6. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 462.898.562,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 395.521.954,00 dan atau sebesar 85,44% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

C. Program Pengelolaan Sumber Daya air (SDA)

Pada tahun 2021, jumlah anggaran Rp. 20.523.731.242,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.385.209.724,00 atau sebesar 94,45% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 765.055.293,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 485.037.577,00 dan atau sebesar 63,40% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Perencanaan/DED yang dihasilkan dengan target 4 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

2. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.817.437.984,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.515.616.147,00 dan atau sebesar 83,39% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Turap yang dibangun dengan target 273 M atau capaian realisasi 100 %.

3. Rehabilitasi Tanggul Sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.803.185.763,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.740.043.000,00 dan atau sebesar 96,50% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang dipelihara dengan target 650 M atau capaian realisasi 100 %.

4. Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.295.586.234,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.178.437.000,00 dan atau sebesar 90,96% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pompa dan Pintu Air yang dipelihara dengan target 40 Unit atau capaian realisasi 100 %.

5. Normalisasi / Restorasi Sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.842.465.968,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.466.076.000,00 dan atau sebesar 97,46% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan dengan target 120 KM atau capaian realisasi 100 %.

6. Rehabilitasi jaringan Irigasi Permukiman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 485.280.000,00 dan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 446.461.000,00 dan atau sebesar 92,00% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Saluran Irigasi Permukaan yang dipelihara 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

D. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pada tahun 2021, jumlah anggaran Rp. 6.128.977.521,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.593.804.650,00 atau sebesar 74,95% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.831.648.955,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.224.279.000,00 dan atau sebesar 84,15% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Saluran Drainase yang dibangun dengan target 2 KM atau capaian realisasi 119,64%.

2. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.297.328.566,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.369.525.650,00 dan atau sebesar 59.61% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang saluran drainase yang bangun dan dipelihara dengan target 3 KM atau capaian realisasi 20.20%.

E. Program Pengembangan Permukiman

Pada tahun 2021, jumlah anggaran Rp. 3.591.000.147,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.150.035.364,00 atau sebesar 87,72% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.591.000.147,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.150.035.364,00 dan atau sebesar 87,72% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah sarana dan prasarana permukiman yang ditingkatkan dan dipelihara dengan target 21 Unit atau capaian realisasi 185,71%.

F. Program Penataan Bangunan Gedung

Pada tahun 2021, jumlah anggaran Rp. 36.991.173.824 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.649.403.947 atau sebesar 85,56% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 160.384.900,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 160.274.900,00 dan atau sebesar 99,93% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.549.410.416,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.236.822.047,00 dan atau sebesar 85,06% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan

Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan target 17 Unit atau capaian realisasi 200,00 %.

3. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.281.378.508,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.252.307.000,00 dan atau sebesar 97,73% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan target 6 Unit atau capaian realisasi 133,33 %.

G. Program Penyelenggaraan Jalan

Pada tahun 2021, jumlah anggaran Rp. 29.370.961.351,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.063.334.966,00 atau sebesar 95,55% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 199.895.225,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.780.000,00 dan atau sebesar 99,94% adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen Kondisi Jalan dan Jembatan dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

2. Pembangunan Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.999.760.320,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.678.044.457,00 dan atau sebesar 97,08% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Jalan yang dibangun dengan target 8,62 KM atau capaian realisasi 79,90 %.

3. Rekonstruksi Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.209.089.435,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.817.848.812,00 dan atau sebesar 94,57% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Jalan yang dibangun dengan target 1,38 KM atau capaian realisasi 212,32%.

4. Rehabilitasi Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.659.068.970,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.333.615.430,00 dan atau sebesar 95,11% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kebutuhan Rehabilitas Jalan dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

5. Pembangunan Jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.933.410.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.848.961.217,00 dan atau sebesar 95,63% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Jembatan yang dibangun dengan target 18 Unit atau capaian realisasi 100 %.

6. Rehabilitasi Jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.369.737.401,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.185.085.050,00 dan atau sebesar 92,21% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kebutuhan Rehabilitas Jembatan dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

H. PROGRAM PENATAAN DESA

Pada tahun 2021, jumlah anggaran Rp. 4.300.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.121.535.316,00 atau sebesar 95,85% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.300.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.121.535.316,00 dan atau sebesar 95,85% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Jalan yang dibangun dengan target 1,2 KM atau capaian realisasi 82,92 %.

I. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pada tahun 2021, jumlah anggaran Rp. 106.291.550,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 87.036.400,00 atau sebesar 81,88% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 33.780.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. Rp 28.948.400,00 dan atau sebesar 85,70% adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi Yang Propesional dengan target 1 Kegiatan atau capaian realisasi 100%.

2. Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 72.511.550,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.088.000,00 dan atau sebesar 80,11% adapun indikator kinerja keluaran adalah Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2021 terhadap program rencana kerja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai** Tahun Anggaran 2021, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 118,143,652,664 dari jumlah Anggaran Rp. 129,976,228,390 atau 90.90% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Gambaran realisasi kinerja anggaran **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai** Tahun 2021 disajikan dalam table 3-3.

Tabel 3-2 Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78,892,230.00	84,795,230.00	0.00%	84,795,230.00
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11,743,200.00	11,743,200.00	0.00%	11,743,200.00
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11,657,100.00	11,657,100.00	0.00%	11,657,100.00
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11,873,400.00	11,873,400.00	0.00%	11,873,400.00
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11,873,400.00	11,873,400.00	0.00%	11,873,400.00
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,536,600.00	9,221,100.00	0.00%	9,221,100.00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,766,800.00	20,082,300.00	0.00%	20,082,300.00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,375,828,171.00	8,270,990,616.00	0.00%	8,270,990,616.00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19,422,270.00	19,422,270.00	0.00%	19,422,270.00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22,826,300.00	22,826,300.00	0.00%	22,826,300.00
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	29,664,000.00	29,664,000.00	0.00%	29,664,000.00
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	59,358,700.00	59,358,700.00	0.00%	59,358,700.00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)			Rp	%
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31,566,626.00	34,054,946.00	0.00%	34,054,946.00	95.37%	0.02%	32,479,100.00	95.37%
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	294,647,990.00	263,003,990.00	0.00%	263,003,990.00	85.66%	0.17%	225,295,600.00	85.66%
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53,860,400.00	53,860,400.00	0.00%	53,860,400.00	76.80%	0.03%	41,362,800.00	76.80%
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158,755,700.00	148,874,772.00	0.00%	148,874,772.00	86.39%	0.10%	128,611,330.00	86.39%
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,116,000.00	19,116,000.00	0.00%	19,116,000.00	19.44%	0.00%	3,716,000.00	19.44%
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533,387,600.00	532,673,760.00	0.00%	532,673,760.00	58.64%	0.24%	312,385,297.00	58.64%
1.3.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0.00	11,532,000.00	0.00%	11,532,000.00	88.87%	0.01%	10,248,200.00	88.87%
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00	0.00%	4,950,000,000.00	100.00%	3.81%	4,950,000,000.00	100.00%
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102,865,200.00	271,758,450.00	0.00%	271,758,450.00	89.58%	0.19%	232,362,500.00	85.50%
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	65,608,200.00	0.00%	65,608,200.00	55.22%	0.03%	36,227,600.00	55.22%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)			Rp	%
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	476,610,000.00	355,824,000.00	0.00%	355,824,000.00	81.48%	0.22%	289,914,003.00	81.48%
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,300,000.00	58,300,000.00	0.00%	58,300,000.00	79.44%	0.04%	46,314,500.00	79.44%
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	966,523,040.00	966,523,040.00	0.00%	966,523,040.00	89.61%	0.67%	866,100,000.00	89.61%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	351,170,000.00	351,170,000.00	0.00%	351,170,000.00	84.36%	0.23%	296,242,763.00	84.36%
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	386,500,000.00	386,500,000.00	0.00%	386,500,000.00	56.21%	0.17%	217,244,800.00	56.21%
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2,007,712,450.00	1,969,428,350.00	0.00%	1,969,428,350.00	96.32%	1.46%	1,896,979,743.00	96.32%
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	849,875,224.00	765,055,293.00	0.00%	765,055,293.00	63.53%	0.37%	485,037,577.00	63.40%
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	574,384,551.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2,110,293,264.00	1,817,437,984.00	0.00%	1,817,437,984.00	96.64%	1.35%	1,515,616,147.00	83.39%
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1,708,038,306.00	1,803,185,763.00	0.00%	1,803,185,763.00	96.50%	1.34%	1,740,043,000.00	96.50%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)			Rp	%
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1,086,558,481.00	1,295,586,234.00	0.00%	1,295,586,234.00	90.96%	0.91%	1,178,437,000.00	90.96%
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	12,683,341,416.00	14,842,465,968.00	0.00%	14,842,465,968.00	97.78%	11.17%	14,466,076,000.00	97.46%
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	296,520,000.00	485,280,000.00	0.00%	485,280,000.00	92.00%	0.34%	446,461,000.00	92.00%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1,982,777,580.00	2,162,979,655.00	0.00%	2,162,979,655.00	98.91%	1.65%	2,104,240,143.00	97.28%
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4,856,984,340.00	6,104,893,794.00	0.00%	6,104,893,794.00	99.64%	4.68%	6,048,078,955.00	99.07%
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	85,733,800.00	49,613,800.00	0.00%	49,613,800.00	100.00%	0.04%	49,613,800.00	100.00%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3,831,648,955.00	3,831,648,955.00	0.00%	3,831,648,955.00	89.76%	2.65%	3,224,279,000.00	84.15%
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1,850,241,373.00	2,297,328,566.00	0.00%	2,297,328,566.00	59.61%	1.05%	1,369,525,650.00	59.61%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)			Rp	%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3,591,000,147.00	3,591,000,147.00	0.00%	3,591,000,147.00	87.72%	2.42%	3,150,035,364.00	87.72%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	99,997,650.00	160,384,900.00	0.00%	160,384,900.00	99.93%	0.12%	160,274,900.00	99.93%
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	29,857,788,349.00	35,549,410,416.00	0.00%	35,549,410,416.00	95.02%	25.99%	30,236,822,047.00	85.06%
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	686,586,113.00	1,281,378,508.00	0.00%	1,281,378,508.00	97.93%	0.97%	1,252,307,000.00	97.73%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								
1.3.10.2.01.4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	0.00	199,895,225.00	0.00%	199,895,225.00	100.00%	0.15%	199,780,000.00	99.94%
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	8,947,202,870.00	10,999,760,320.00	0.00%	10,999,760,320.00	98.47%	8.33%	10,678,044,457.00	97.08%
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	7,129,097,434.00	7,209,089,435.00	0.00%	7,209,089,435.00	99.31%	5.51%	6,817,848,812.00	94.57%
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	4,783,161,780.00	6,659,068,970.00	0.00%	6,659,068,970.00	95.11%	4.87%	6,333,615,430.00	95.11%
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	1,910,358,000.00	1,933,410,000.00	0.00%	1,933,410,000.00	95.83%	1.43%	1,848,961,217.00	95.63%
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	2,267,377,680.00	2,369,737,401.00	0.00%	2,369,737,401.00	92.21%	1.68%	2,185,085,050.00	92.21%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)			Rp	%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	33,780,000.00	33,780,000.00	0.00%	33,780,000.00	85.70%	0.02%	28,948,400.00	85.70%
1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	72,511,550.00	72,511,550.00	0.00%	72,511,550.00	80.11%	0.04%	58,088,000.00	80.11%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	299,994,700.00	361,229,200.00	0.00%	361,229,200.00	78.85%	0.22%	284,843,786.00	78.85%
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	89,489,700.00	87,742,200.00	0.00%	87,742,200.00	68.98%	0.05%	60,521,844.00	68.98%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	99,971,610.00	99,971,610.00	0.00%	99,971,610.00	99.74%	0.08%	99,713,400.00	99.74%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	49,965,500.00	59,005,500.00	0.00%	59,005,500.00	75.84%	0.03%	44,752,023.00	75.84%
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	79,957,710.00	88,742,910.00	0.00%	88,742,910.00	99.72%	0.07%	88,492,150.00	99.72%
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	299,982,562.00	462,898,562.00	0.00%	462,898,562.00	85.44%	0.30%	395,521,954.00	85.44%
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)			Rp	%
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37,992,700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
	PROGRAM PENATAAN DESA								
	Penyelenggaraan Penataan Desa								
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00	0.00%	4,300,000,000.00	100.00%	3.31%	4,121,535,316.00	95.85%
		114,609,070,522	129,976,228,390	100.00%	129,976,228,390		94.59%	118,143,652,664	90.90%

Tabel 3-4 Rincian Sumber Pendaan Dinas PUPR Diluar APBD Kota Dumai

NO	NAMA PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	BIDANG
1	Pembangunan Ruas Jalan Jl. Abdullah Ali (DAK)	4,199,998,950	DAK	BINA MARGA
2	Peningkatan Jl. Mattaim (DAK)	4,706,518,500	DAK	BINA MARGA
3	Peningkatan Jl Sukadamai (DAK)	2,272,570,445	DAK	BINA MARGA
4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan dengan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi - Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan (DAK Penugasan)	810,000,000	DAK	CIPTA KARYA
5	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan dengan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi - Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai (DAK Penugasan)	850,000,000	DAK	CIPTA KARYA
9	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan -dengan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan (DAK Penugasan)	1,530,000,000	DAK	CIPTA KARYA
10	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan -dengan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat (DAK Penugasan)	1,731,000,000	DAK	CIPTA KARYA
11	Pembangunan Kios Kawasan Kuliner Jl. Janur Kuning (DID)	2,287,660,000	DID	CIPTA KARYA
12	Pembangunan Turap Jl. Janur Kuning (DID)	1,424,022,168	DID	SUMBER DAYA AIR
	TOTAL DAK	16,100,087,895		
	TOTAL DID	3,711,682,168		
	TOTAL ANGGARAN DI LUAR APBD	19,811,770,063		

DAD IV

4. Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum adalah perwujudan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pekerjaan Umum dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Capaian indikator kinerja pada tahun 2021 seluruhnya **94.59%** dan realisasi keuangan tercapai **90.90%**.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas pekerjaan Umum di tahun mendatang harus lebih memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan permasalahan yang ada dapat diminimalisir sehingga berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya strategis tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Kota Dumai dengan Provinsi serta Pemerintah Pusat;
2. Mengoptimalkan kinerja sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana sehingga dapat tercapai *good governance*;
3. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal;
4. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan, dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 ini telah dapat memenuhi kewajiban dan syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai secara berkesinambungan.

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. AHMADI.M.Si**
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Paisal, SKM, MARS**
Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, November 2021

PIHAK KEDUA

H. Paisal, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA

Drs. AHMADI.M.Si
NIP. 19631220 198702 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan	Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	Sambungan Rumah	16230
2	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi kegiatan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	87,5
		Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	87,5
3	Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Sarana Pengendali Banjir	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,35
		Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	71,2
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	72

Sasaran 1	: Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan	1. 03. 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan air Minum	Rp.	8.317.487.249
		1. 03. 03. 2. 01. 04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp.	2.162.979.655
		1. 03. 03. 2. 01.07	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp.	6.104.893.794
		1. 03. 03. 2. 01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Rp.	49.613.800
Sasaran 2	: Mewujudkan fungsi dan klasifikasi kegiatan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	1. 03. 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	1.159.589.982
		1. 03. 12. 2. 01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
		1. 03. 12. 2. 01. 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Rp.	361.229.200
		1. 03. 12. 2. 01. 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Rp.	87.742.200
		1. 03. 12. 2. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
		1. 03. 12. 2. 03. 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Rp.	99.971.610
		1. 03. 12. 2. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
		1. 03. 12. 2. 04. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Rp.	59.005.500
		1. 03. 12. 2. 04. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan dan Penegak Hukum Bidang Penataan Ruang	Rp.	88.742.910
		1. 03. 12. 2. 04. 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp.	462.898.562
Sasaran 3	: Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Sarana Pengendali Banjir	1. 03. 02	Program Pengelolaan Sumber Daya air (SDA)	Rp.	21.009.011.242

1. 03. 02. 2. 01. 03	Penyusunan Rencana Teknis dan dokumen lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase, Utama Perkotaan dan	Rp.	765.055.293
1. 03. 02. 2. 01. 10	Pengamanan pantai	Rp.	1.817.437.984
1. 03. 02. 2. 01. 24	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp.	1.803.185.763
1. 03. 02. 2. 01. 26	Rehabilitasi Tanqqul sungai	Rp.	1.295.586.234
1. 03. 02. 2. 01. 46	Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Rp.	14.842.465.968
1. 03. 02. 2. 02. 14	Normalisasi / Restorasi Sungai Rehabilitasi jaringan Irigasi Permukiman	Rp.	485.280.000
1. 03. 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	6.128.977.521
1. 03. 06. 2. 01. 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp.	3.831.648.955
1. 03. 06. 2. 01. 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rp.	2.297.328.566
1. 03. 07	Program Pengembangan Permukiman	Rp.	3.591.000.147
1. 03. 07. 2. 01. 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	3.591.000.147
1. 03. 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	36.991.173.824
1. 03. 08. 2. 01. 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Rp.	160.384.900
1. 03. 08. 2. 01. 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah kabupaten/ Kota	Rp.	35.549.410.416
1. 03. 08. 2. 01. 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	1.281.378.508
1. 03. 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	29.370.961.351
1. 03. 10. 2. 01. 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp.	199.895.225
1. 03. 10. 2. 01. 05	Pembangunan Jalan	Rp.	10.999.760.320
1. 03. 10. 2. 01. 08	Rekonstruksi Jalan	Rp.	7.209.089.435
1. 03. 10. 2. 01. 09	Rehabilitasi Jalan	Rp.	6.659.068.970
1. 03. 10. 2. 01. 12	Pembangunan jembatan	Rp.	1.933.410.000
1. 03. 10. 2. 01. 18	Rehabilitasi Jembatan	Rp.	2.369.737.401
2. 13. 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp.	4.300.000.000
2. 13. 02. 2. 01. 06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Rp.	4.300.000.000
1. 03. 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	106.291.550
1. 03. 11. 2. 01. 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp.	33.780.000
1. 03. 11. 2. 01. 05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Rp.	72.511.550
Jumlah		Rp.	110.974.492.866



PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, November 2021

PIHAK PERTAMA



Drs. AHMADI, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19631220 198702 1 001

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUNAN
TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2021
(1)	(2)		(4)	(5)
1	Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan	Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	Sambungan Rumah	16230
2	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi kegiatan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	87,5
		Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	87,5
3	Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Sarana Pengendali Banjir	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,35
		Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	71,2
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	72

Dumai, November 2021



Pihak Pertama
Pt. KEPALA

Drs. AHMADI.M.Si

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19631220 198702 1 001

**RENCANA AKSI
TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
				Tahunan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan	Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	Sambungan Rumah	16230	2311	3000	4000	5000	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan air Minum			8.317.487.249
2	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi kegiatan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	87,5	86	86,55	87	87,5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			1.159.589.982
		Persentase fungsi dan klasifikasibangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	87,5	86	86,55	87	87,5				
3	Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Sarana Pengendali Banjir	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,35	33,48	33,6	33,8	34	Program Pengelolaan sumber Daya Air (SDA)			21.009.011.242
		Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	71,2	72	73	75	78	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			6.128.977.521
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	72	84	86	88	90	Program Pengembangan Permukiman			3.591.000.147
									Program Penataan Bangunan Gedung			36.991.173.824

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Pelaksanaan				Program	Indikator	Target	Pagu
				Tahunan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Program		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Program Penyelenggaraan Jalan			29.370.961.351
									Program Pengembangan Jasa Konstruksi			106.291.550
									PROGRAM PENATAAN DESA			4.300.000.000
											Jumlah	110.974.492.866



Pit. KEPALA

(Handwritten signature in blue ink)

Dis. AHMADI.M.Si

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19631220 198702 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERUBAHAN TAHUN 2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Indikator	Satuan	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	Sambungan Rumah	600	800	4300	10015	16230
2	Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	77,5	77,5	82,5	85	87,5
	Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	77,5	77,5	82,5	85	87,5
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	52,35	53,85	55,35	56, 85	58,35
	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	52	56,8	61,6	66,4	71,2
	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	28	40	52	60	72

Dumai, November 2021

Plt. KEPALA



Drs. AHMADI.M.Si

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19631220 198702 1 001